



Anton Tabah

Posisi Ideal Kepolisian Dalam Negara

Oleh : Anton Tabah

Perwira Menengah Polri

Prof. Reckless awal abad XX mengingatkan struktur organisasi Kepolisian yang tepat dalam negara menunjang penegakan hukum dan masyarakat demokratis. Terjadi sebaliknya jika posisi Kepolisian tak tepat.

IRONIS, Indonesia sudah 60 tahun merdeka masih berkuat pada reposisi Polri. Mestinya Polri yang lebih tahu bagaimana seyogyanya agar kenerjanya semakin profesional efektif. Bukan lembaga lain.

Buku *The Real War On Crime* karya Steven Donziger, Nyork 2005 mengevaluasi sistem Kepolisian Federal yang inefesien menghadapi *spectrum transnational crime*. Disarankan agar negara-negara geografis yang memiliki luas demografi besar dan negara kepulauan memakai sistem Kepolisian *sentralized*. Tak ada kendala penanganan kriminal lintas batas.

RRC dan India dengan kementerian Kepolisian bertanggung jawab pada Presiden. Jepang ketika kalah perang PD II dipaksa membentuk Kepolisian federal mulai 1952 berubah menjadi

National Police Sentralized (NPA) di bawah Perdana Menteri. Yang aneh Polri terus menerus jadi rebutan berbagai kepentingan sejak merdeka 1945 sampai 2006, diusik sehingga nyaris habis energi untuk memikirkan hal yang tak perlu.

Berdasarkan pemikiran Donziger, setidaknya ada empat macam posisi Polri, dibawah Depdagri tidak mungkin karena pernah dicoba tidak efektif. Di bawah Menkopolkukam, tidak tepat, karena Polhukam hanya koordinatif. Departemen baru (Departemen Keamanan) perlu biaya tinggi. Atau Kementrian Kepolisian ala era keemasannya tahun 50-an?

Struktur Kepolisian berbeda di tiap negara. Tidak seperti tentara

di semua negara demokrasi harus sama sistem dan organisasinya (Doktrin *Eus Ed Bellum*) karena tentara bukan pelayan publik. Tak ada aktor tunggal boleh menggerakkan tentara. Sekecil apapun pelibatan tentara ke otoritas sipil harus melalui keputusan politik minimal dengan tiga aktor negara yaitu Presiden, DPR dan Menham (*Rule of Engagement*) kecuali pelibatan dalam menangani bencana alam. Polisi jelas pelayan publik karena tak mudah memposisikan Kepolisian harus dimana, yang penting bisa bekerja efektif dan efisien.

Awal-awal era kepemimpinan Jenderal Soekanto, Polri menemukan jati diri dalam era keemasannya. Mulai 1 Juli 1946 Polri



yang keluar dari Depdagri menjadi Kepolisian Nasional bisa bekerja tanpa intervensi/kooptasi. Secara teknis Polri dapat meningkatkan profesionalisme dan struktural leluasa mengembangkan organisasi sampai ke tingkat Kecamatan dan operasional Kapolri atau Menteri Kepolisian Negara saat itu bertanggung jawab pada Kepala Negara sehingga cepat mengambil keputusan dan intervensi mudah dikontrol.

Era kejayaan Polri itu hendak diukir lagi ketika awal reformasi atas Keputusan Rakyat (TAP MPR VI dan VII/2000) Polri mulai berbenah tahap demi tahap. Merombak bidang struktural, instrumental dan kultural. Juga membentuk lembaga superboddy yaitu *Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas)* yang bertugas selain membantu Presiden mengawasi kerja Kepolisian juga memfasilitasi terwujudnya postur Polri yang profesional dan mampu mengemban visi misi selaku penegak



hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Profesionalisme Polri meningkat pesat dengan *sains dan teknologi scientific crime investigation*. Diantaranya dengan mengungkap kasus Bom Bali dengan teknologi *re-exting* (penampakan kembali nomor kendaraan) yang hancur dalam pengeboman. Juga pengungkapan kasus Bom Marriot dan Kedubes Australia di Jakarta dengan teknologi *Disaster Victim Identification (DVI)* mengungkap mayat pelaku maupun korban. Dari kedua kasus tersebut Polisi berhasil mengidentifikasi mayat pelaku. Polisi berhasil membongkar jaringan.

Peningkatan profesionalisme Polri karena jauh dari intervensi. Ini memungkinkan karena Polri mandiri dan struktur organisasinya tidak di bawah lembaga apapun, sehingga Polri dapat leluasa menjalankan tugas sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Polisi. Posisi Polri di era reformasi persis sama dengan Posisi Polri di era keemasannya

dari 1950 sampai akhir 1959. Polri jauh dari intervensi dan kooptasi. Sejarah adalah saksi jujur, Polri dibawah Presiden jauh lebih baik dan pas di Indonesia yang budaya politik intervensinya sangat tinggi. Jika tidak ada intervensi dari satu lembaga (Presiden) akan cepat dan mudah dikontrol.

Isu mengusung TNI dan Polri ke wilayah abu-abu (*grey area*) menarik kembali Polri dibawah departemen tertentu karena TNI akan dibawah Dephan. TNI dan Polri sangat berbeda. Polri pelayan publik, sedangkan TNI bukan pelayan publik. Organisasi tentara diseluruh dunia sama. Sedang organisasi Kepolisian berbeda ditiap negara. Di era demokrasi, membangun Kepolisian yang kuat adalah keniscayaan karena ruh demokrasi adalah supremasi hukum. Apapun yang melemahkan Kepolisian hanya akan menghancurkan demokrasi yang sedang dibangun, salah satu syarat demokrasi/ *civil society*. **Negara mutlak memiliki Kepolisian yang kuat dan independent.** ***

Profesionalisme Polri meningkat pesat dengan sains dan teknologi scientific crime investigation. Diantaranya dengan mengungkap kasus Bom Bali dengan teknologi re-exting (penampakan kembali nomor kendaraan) yang hancur dalam pengeboman. Juga pengungkapan kasus Bom Marriot dan Kedubes Australia di Jakarta dengan teknologi Disaster Victim Identification (DVI) mengungkap mayat pelaku maupun korban.